



# SISTEM POLITIK MASYARAKAT ISLAM SUNDA PADA MASA KOLONIAL BERDASARKAN NASKAH AMANAT GALUNGGUNG (1816-1942 M)

Usman Supendi\*<sup>1</sup>, Satya Adilaga Suwanda<sup>2</sup>  
UIN Sunan Gunung Djati

Author\*<sup>1</sup>: Usman Supendi  
kangusmansupendi@gmail.com

Author<sup>2</sup>: Satya Adilaga Suwanda  
satyaadilagasuwanda@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>

Received: 24 Maret 2025

Accepted: 25 Maret 2025

Published: 26 Maret 2025



Copyright: © 2024 by the authors.  
Submitted for open access  
publication under the terms and  
conditions of the Creative Commons  
Attribution (CC BY) license  
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *This study examines the political system of Sundanese Muslim society during the colonial period by referring to the Amanat Galunggung manuscript. This manuscript not only reflects the traditional socio-political structure of Sundanese society but also reflects adaptation to the pressures of colonialism. Through a philological and historical approach, this study identifies Islamic values in the Sundanese political system which is hierarchical but remains collective. The findings show that Sundanese society maintains the concepts of justice, deliberation, and loyalty to leaders as the basis for political stability. Although colonial policies such as the cultuurstelsel changed local dynamics, the values in this manuscript became a form of passive resistance that allowed Sundanese Muslim society to maintain internal harmony. This study also finds the relevance of the values in the Amanat Galunggung for modern political governance based on justice and public participation.*

**Keywords:** *Political system, Sundanese Islamic society, Colonialism, Galunggung Mandate*

**Abstrak:** *Penelitian ini mengkaji sistem politik masyarakat Islam Sunda pada masa kolonial dengan merujuk pada naskah Amanat Galunggung. Naskah ini tidak hanya merefleksikan struktur sosial-politik tradisional masyarakat Sunda tetapi juga mencerminkan adaptasi terhadap tekanan kolonialisme. Melalui pendekatan filologis dan historis, penelitian ini mengidentifikasi nilai-nilai Islam dalam sistem politik Sunda yang bercorak hierarkis namun tetap kolektif. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat Sunda mempertahankan konsep keadilan, musyawarah, dan kesetiaan kepada pemimpin sebagai basis stabilitas politik. Meski kebijakan kolonial seperti cultuurstelsel mengubah dinamika lokal, nilai-nilai dalam naskah ini menjadi bentuk resistensi pasif yang memungkinkan masyarakat Islam Sunda menjaga harmoni internal. Penelitian ini juga menemukan relevansi nilai-nilai dalam Amanat Galunggung untuk tata kelola politik modern yang berbasis pada keadilan dan partisipasi publik.*

**Kata Kunci:** *Sistem politik, masyarakat Islam Sunda, kolonialisme, Amanat Galunggung*

## PENDAHULUAN

Naskah Amanat Galunggung merupakan salah satu manuskrip kuno yang berasal dari tradisi literasi Sunda kuno. Naskah ini dipercaya memuat panduan kehidupan yang mencakup aspek politik, sosial, dan agama. Dalam naskah ini, terdapat ajaran tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat, nilai-nilai keadilan, dan pentingnya musyawarah. Penelusuran isi naskah ini memberikan wawasan tentang sistem politik masyarakat Islam Sunda, khususnya pada masa kolonial, di mana tradisi lokal mengalami tekanan akibat kebijakan pemerintah kolonial. Identitas naskah Amanat Galunggung menunjukkan bahwa ia ditulis dalam bahasa Sunda Kuno dengan aksara Buda, yang khas digunakan pada periode sebelum dan awal Islamisasi di tatar Sunda. Naskah ini juga mencerminkan transisi sosial budaya dari tradisi Hindu-Buddha menuju tradisi Islam, yang terlihat dalam nilai-nilai Islam seperti keadilan dan musyawarah yang tertanam dalam ajarannya. Pentingnya memahami Amanat Galunggung sebagai sumber historis terletak pada kemampuannya menjembatani pemahaman

mengenai sistem politik lokal dan bagaimana nilai-nilai Islam dipadukan dalam kehidupan masyarakat Sunda. Dalam konteks masa kolonial, masyarakat Islam Sunda menghadapi tantangan besar dengan adanya kebijakan seperti *cultuurstelsel* yang merampas kedaulatan lokal dan mengubah struktur kekuasaan tradisional. Meskipun demikian, nilai-nilai lokal yang tercermin dalam naskah ini tetap dipertahankan sebagai bentuk resistensi terhadap kolonialisme .

Dinamika politik masyarakat Islam Sunda pada masa kolonial ditandai oleh dualisme kepemimpinan antara pemimpin tradisional, seperti kepala desa, dan otoritas kolonial. Kebijakan pemerintah kolonial, seperti monopoli hasil bumi dan penyeragaman struktur administrasi, melemahkan otoritas pemimpin lokal. Namun, masyarakat Sunda tetap memegang prinsip musyawarah sebagai cara untuk menjaga harmoni sosial di tengah tekanan eksternal. Prinsip ini terekam dalam kutipan naskah yang berbunyi: "*Nya ukur musyawarah nu kudu dijaga, sabab di dinya rahayu rahayat.*"

Pemahaman terhadap naskah Amanat Galunggung menjadi penting tidak hanya untuk memahami sejarah lokal tetapi juga untuk menggali bagaimana masyarakat Sunda beradaptasi dengan tantangan kolonial tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai Islam yang mereka junjung.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan filologi untuk menganalisis sistem politik masyarakat Islam Sunda pada masa kolonial berdasarkan naskah Amanat Galunggung. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menggali informasi historis dari sumber primer berupa naskah kuno dan menghubungkannya dengan konteks sosial-politik pada masa tersebut.

Pendekatan sejarah digunakan untuk memahami dinamika sistem politik masyarakat Islam Sunda pada masa kolonial. Metodologi ini melibatkan beberapa langkah:

1. Heuristik: Proses pengumpulan sumber, termasuk naskah Amanat Galunggung, arsip kolonial, catatan sejarah lokal, dan literatur pendukung lainnya. Heuristik dilakukan untuk memastikan keabsahan sumber dan relevansinya terhadap penelitian.
2. Kritik Sumber: Analisis kritis terhadap sumber-sumber yang diperoleh, baik dari segi eksternal (otentisitas naskah, asal-usul, dan bentuk fisik) maupun internal (isi, bahasa, dan struktur teks). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa naskah Amanat Galunggung mencerminkan kondisi politik dan sosial pada masanya.
3. Interpretasi: Proses penafsiran isi naskah dengan menghubungkannya pada konteks kolonial di wilayah Sunda, termasuk pengaruh kolonialisme terhadap struktur politik masyarakat Islam Sunda.
4. Historiografi: Penulisan hasil penelitian dalam bentuk narasi ilmiah yang memuat temuan utama terkait sistem politik masyarakat Sunda dan peran naskah Amanat Galunggung sebagai sumber historis.

Pendekatan filologi diterapkan untuk menganalisis naskah Amanat Galunggung secara mendalam. Langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan ini meliputi:

1. Inventarisasi dan Katalogisasi: Mengidentifikasi naskah Amanat Galunggung sebagai bagian dari warisan budaya Sunda. Inventarisasi mencakup informasi tentang asal-usul, bahan, aksara, dan bahasa yang digunakan.
2. Transliterasi: Mengubah teks dari aksara Sunda Kuno ke aksara Latin untuk memudahkan analisis. Proses ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan akurasi teks yang dihasilkan.

3. Kritik Teks: Melakukan rekonstruksi teks untuk mendapatkan versi yang mendekati bentuk aslinya. Hal ini mencakup perbandingan antara berbagai versi naskah jika tersedia.
4. Terjemahan dan Analisis Isi: Menerjemahkan teks ke dalam bahasa Indonesia modern dan menganalisis maknanya, khususnya yang berkaitan dengan sistem politik dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya.

Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan hasil penelitian yang komprehensif, tidak hanya dalam memahami isi naskah secara tekstual, tetapi juga dalam menghubungkannya dengan konteks sejarah masyarakat Islam Sunda pada masa kolonial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali peran naskah Amanat Galunggung dalam merefleksikan dan mempertahankan nilai-nilai politik lokal di tengah tekanan kolonialisme

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Naskah *Amanat Galunggung* merefleksikan struktur politik tradisional masyarakat Islam Sunda, yang berbasis pada hubungan hierarkis antara pemimpin dan rakyat. Dalam naskah ini, kekuasaan pemimpin dilihat sebagai wujud amanah yang harus dijalankan dengan adil, sedangkan rakyat berkewajiban untuk setia dan menghormati pemimpin. Hal ini tercermin dalam kutipan: “*Sing saha nu ngabdi ka ratu, mangka hirupna bakal lungguh jeung rahayu.*” (Barang siapa yang setia kepada raja, maka hidupnya akan sejahtera dan damai).

Kutipan ini menunjukkan konsep legitimasi kekuasaan, di mana ketaatan rakyat terhadap pemimpin menjadi fondasi stabilitas sosial-politik. Dalam tradisi politik masyarakat Sunda, pemimpin dianggap sebagai wakil Tuhan yang bertanggung jawab tidak hanya secara duniawi tetapi juga spiritual.

### Hierarki Sosial dan Peran Pemimpin Lokal

Struktur politik tradisional masyarakat Islam Sunda mengikuti pola hierarkis yang terdiri atas:

1. Raja memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur sosial-politik. Ia tidak hanya memerintah tetapi juga menjadi figur spiritual yang melindungi rakyatnya. Raja dianggap sebagai pemegang mandat ilahi, sehingga segala tindakannya harus mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan.
2. Pemimpin lokal memainkan peran penting dalam menghubungkan rakyat dengan kekuasaan pusat. Kepala desa bertanggung jawab atas administrasi wilayah, sedangkan tokoh agama memastikan masyarakat menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kolonial, pemimpin lokal sering kali berada dalam tekanan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kebijakan pemerintah kolonial.
3. Rakyat memiliki peran sebagai pendukung sistem politik dengan menjaga ketaatan kepada pemimpin. Dalam Amanat Galunggung, kesetiaan kepada pemimpin dijelaskan sebagai salah satu syarat terciptanya kehidupan yang harmonis. Namun, ketaatan ini bersifat timbal balik, di mana pemimpin harus memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak rakyatnya.

### Konsep Keadilan dan Musyawarah dalam Kepemimpinan

Nilai-nilai Islam yang diintegrasikan dalam struktur politik tradisional Sunda mencakup keadilan dan musyawarah. Pemimpin yang adil akan memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari rakyatnya, sebagaimana digambarkan dalam prinsip musyawarah yang termuat dalam naskah: “Nya

ukur musyawarah nu kudu dijaga, sabab di dinya rahayu rahayat”(Hanya dengan musyawarah kesejahteraan rakyat dapat terwujud).

Musyawarah menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan, yang melibatkan pemimpin dan tokoh masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya partisipasi kolektif dalam menjalankan pemerintahan, meskipun dalam bingkai hierarkis. Struktur politik ini menjadi benteng sosial bagi masyarakat Sunda dalam menghadapi tekanan kolonial. Meskipun kekuasaan kolonial memperkenalkan sistem administrasi baru, nilai-nilai tradisional yang tercermin dalam Amanat Galunggung tetap dipertahankan sebagai bentuk perlawanan kultural.

### **Dampak Kolonialisme terhadap Sistem Politik Sunda**

Kolonialisme membawa perubahan mendasar pada sistem politik tradisional masyarakat Sunda. Kebijakan pemerintah kolonial, khususnya di bidang administrasi dan ekonomi, menyebabkan dualisme kepemimpinan yang melemahkan otoritas lokal. Selain itu, kebijakan seperti *cultuurstelsel* berdampak signifikan terhadap kedaulatan lokal, memaksa masyarakat Sunda beradaptasi dengan sistem politik baru yang mengakomodasi kepentingan kolonial.

#### **1. Dualisme Kepemimpinan: Pemimpin Adat vs Otoritas Kolonial**

Pada masa kolonial, sistem politik tradisional masyarakat Sunda mengalami tantangan besar dengan hadirnya dualisme kepemimpinan. Pemimpin adat, seperti kepala desa dan tokoh agama, yang sebelumnya memiliki otonomi besar, kini harus berbagi kekuasaan dengan pejabat kolonial yang diangkat langsung oleh pemerintah Belanda.

- a. Pemimpin adat tetap diakui sebagai pengelola urusan sosial dan budaya lokal, termasuk dalam memelihara tradisi dan menyelesaikan konflik internal masyarakat. Namun, ruang gerak mereka terbatas karena sebagian besar kebijakan strategis diambil alih oleh otoritas kolonial.
- b. Otoritas kolonial memperkenalkan sistem administrasi baru yang memprioritaskan kepentingan penjajah, seperti pengumpulan pajak dan pengelolaan lahan pertanian untuk kepentingan ekspor. Pemimpin adat sering kali dijadikan perpanjangan tangan pemerintah kolonial, sehingga menyebabkan dilema loyalitas di kalangan mereka.

Dualisme ini menciptakan ketegangan antara tradisi lokal dan struktur pemerintahan baru. Sebagai contoh, pemimpin adat yang loyal kepada kolonial sering kehilangan legitimasi di mata rakyat, sementara mereka yang tetap setia kepada nilai-nilai lokal dianggap subversif oleh pemerintah Belanda.

#### **2. Kebijakan *Cultuurstelsel* dan Pengaruhnya terhadap Kedaulatan Lokal**

Pada tahun 1830, pemerintah kolonial memberlakukan *cultuurstelsel* (sistem tanam paksa), yang mewajibkan petani menyerahkan sebagian hasil buminya untuk ekspor. Kebijakan ini sangat berdampak pada struktur politik dan ekonomi masyarakat Sunda:

- a. *Cultuurstelsel* menempatkan pemimpin adat sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan kolonial. Kepala desa sering kali dipaksa untuk memobilisasi rakyat dalam menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap pemimpin lokal menurun karena mereka dianggap sebagai alat kolonial.
- b. Sistem ini mengakibatkan eksploitasi besar-besaran terhadap tenaga kerja dan sumber daya lokal. Banyak rakyat yang kehilangan lahan pertaniannya untuk tanaman ekspor, yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Kondisi ini melemahkan kedaulatan lokal, karena masyarakat menjadi semakin bergantung pada pemerintah kolonial.

Namun, nilai-nilai tradisional seperti musyawarah dan keadilan yang terkandung dalam naskah Amanat Galunggung tetap dipertahankan sebagai bentuk perlawanan kultural. Meskipun ruang gerak pemimpin adat semakin terbatas, mereka berupaya mempertahankan identitas politik lokal dengan mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kolonialisme, dengan segala dampaknya, tidak sepenuhnya menghancurkan struktur politik masyarakat Sunda. Sebaliknya, masyarakat Sunda menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi sambil mempertahankan inti dari sistem politik mereka, yang berakar pada tradisi Islam dan budaya lokal.

### **Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Resistensi**

Kearifan lokal yang terkandung dalam Amanat Galunggung merepresentasikan nilai-nilai tradisional masyarakat Sunda, seperti musyawarah dan keadilan, yang berfungsi sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi kolonial. Meskipun penjajahan mengubah struktur sosial-politik masyarakat Sunda, nilai-nilai ini tetap dipertahankan sebagai simbol perlawanan pasif.

#### **1. Nilai Musyawarah dalam Naskah sebagai Simbol Perlawanan Pasif**

Musyawarah, atau pengambilan keputusan bersama, menjadi salah satu nilai inti dalam sistem sosial-politik masyarakat Sunda yang tercermin dalam Amanat Galunggung. Dalam salah satu bagiannya tertulis: “*Nya ukur musyawarah nu kudu dijaga, sabab di dinya rahayu rahayat.*” (Hanya dengan musyawarah kesejahteraan rakyat dapat terwujud).

Nilai musyawarah ini memiliki dua makna penting sebagai bentuk resistensi:

- a. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu, terutama penguasa kolonial, yang sering kali bertentangan dengan prinsip kolektivisme masyarakat Sunda. Musyawarah menjadi cara untuk melawan secara pasif, dengan tetap menjaga harmoni sosial melalui kebersamaan dan pengambilan keputusan yang mencakup suara semua pihak.
- b. Dalam musyawarah, masyarakat Sunda dapat menyampaikan aspirasi mereka tanpa harus bertindak konfrontatif. Proses ini menunjukkan keberanian untuk tetap menjalankan tradisi lokal di tengah tekanan kebijakan kolonial. Dalam banyak kasus, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah juga menjadi bentuk kompromi yang melindungi kepentingan rakyat dari eksploitasi lebih lanjut.

#### **2. Perlawanan Pasif melalui Pemeliharaan Tradisi Lokal**

Kearifan lokal seperti musyawarah mencerminkan perlawanan yang tidak langsung terhadap penjajahan. Alih-alih melakukan perlawanan fisik yang rentan terhadap penindasan, masyarakat Sunda memilih untuk mempertahankan tradisi mereka sebagai bentuk pembangkangan kultural. Praktik ini juga berfungsi untuk memperkuat solidaritas antarwarga. Nilai musyawarah yang dijunjung tinggi menunjukkan bahwa, meskipun sistem kolonial berusaha mendikte kehidupan masyarakat, orang Sunda tetap memegang teguh prinsip mereka untuk memastikan kesejahteraan bersama. Dalam konteks kolonialisme, ini mencerminkan bentuk perlawanan yang subtil namun efektif terhadap dominasi politik dan budaya penjajah. Melalui nilai-nilai yang tercermin dalam Amanat Galunggung, masyarakat Sunda berhasil mempertahankan identitas mereka, menunjukkan bahwa perlawanan tidak selalu harus dilakukan dengan cara konfrontasi langsung, tetapi juga bisa melalui strategi kultural yang mengakar dalam tradisi.

## Relevansi Amanat Galunggung dalam Konteks Modern

Naskah Amanat Galunggung yang sarat akan nilai-nilai kearifan lokal memiliki relevansi signifikan dalam membentuk paradigma politik modern, terutama dalam menanamkan prinsip keadilan dan partisipasi dalam sistem demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam naskah ini dapat menjadi pedoman moral bagi masyarakat dan pemimpin untuk membangun tata kelola yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

### 1. Pembelajaran Nilai-nilai Keadilan

Salah satu pesan penting dalam Amanat Galunggung adalah tentang keadilan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini tercermin dalam prinsip: "*Sing saha nu ngabdi ka ratu, mangka hirupna bakal lungguh jeung rahayu.*" (Barang siapa yang setia kepada pemimpin, maka hidupnya akan sejahtera).

Keadilan yang dimaksud dalam naskah ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga mencakup distribusi kesejahteraan yang merata. Dalam konteks modern, pesan ini relevan untuk mengingatkan para pemimpin agar mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut Nasution keadilan adalah elemen kunci dalam menciptakan stabilitas politik dan sosial di masyarakat modern.

### 2. Partisipasi Masyarakat dalam Politik

Prinsip musyawarah yang diusung dalam Amanat Galunggung mengajarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan: "*Nya ukur musyawarah nu kudu dijaga, sabab di dinya rahayu rahayat.*" (Hanya dengan musyawarah kesejahteraan rakyat dapat terwujud).

Dalam politik modern, partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam demokrasi. Nilai musyawarah ini dapat diterjemahkan ke dalam praktik seperti diskusi publik, forum warga, dan pemilu yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Partisipasi yang inklusif tidak hanya menciptakan keputusan yang lebih legitim, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan

### 3. Relevansi dalam Menghadapi Tantangan Global

Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi yang cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal, Amanat Galunggung menawarkan pandangan yang menyeimbangkan modernitas dengan tradisi. Dalam pandangan Mochtar Lubis Penguatan nilai-nilai lokal seperti keadilan dan partisipasi dapat menjadi benteng dalam menghadapi tantangan politik global yang sering kali bersifat eksploitatif dan individualistik. Nilai-nilai dari Amanat Galunggung mendorong pemimpin modern untuk memadukan pendekatan rasional dengan pendekatan etis yang berakar pada budaya lokal. Dengan demikian, tradisi politik yang berakar pada nilai-nilai luhur dapat menjadi dasar untuk membangun sistem politik yang adil dan partisipatif di era modern.

## KESIMPULAN

Kesimpulan Penelitian mengenai *Sistem Politik Masyarakat Islam Sunda Masa Kolonial Berdasarkan Naskah Amanat Galunggung* mengungkapkan pentingnya peran naskah ini sebagai sumber historis yang merekam struktur politik tradisional dan dinamika masyarakat Sunda dalam menghadapi kolonialisme. Temuan utama penelitian ini meliputi:

1. Naskah *Amanat Galunggung* menekankan hierarki sosial dengan konsep kepemimpinan yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemimpin lokal berperan sebagai penghubung

antara masyarakat dan otoritas, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Kutipan seperti "*Sing saha nu ngabdi ka ratu, mangka hirupna bakal lungguh jeung rahayu*" mencerminkan legitimasi kepemimpinan yang berbasis pada kepercayaan dan kepedulian terhadap rakyat.

2. Kolonialisme menciptakan dualisme kepemimpinan, yaitu antara pemimpin adat dan otoritas kolonial, yang sering kali menimbulkan ketegangan. Kebijakan seperti *cultuurstelsel* merusak kedaulatan lokal dan memengaruhi struktur sosial-politik masyarakat. Namun, masyarakat Sunda menunjukkan resistensi melalui pemeliharaan nilai-nilai tradisional, seperti keadilan dan musyawarah.
3. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Amanat Galunggung*, seperti musyawarah dan keadilan, menjadi bentuk perlawanan pasif terhadap dominasi kolonial. Masyarakat Sunda menggunakan tradisi lokal sebagai alat untuk mempertahankan identitas mereka di tengah tekanan penjajah.
4. Nilai-nilai keadilan dan partisipasi yang terkandung dalam naskah ini masih relevan untuk membangun sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Pesan musyawarah dan keadilan dalam *Amanat Galunggung* memberikan pelajaran penting bagi masyarakat modern tentang pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan.

Melalui penelitian ini, *Amanat Galunggung* terbukti bukan hanya sebagai dokumen historis, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengajarkan nilai-nilai universal yang relevan lintas zaman. Dengan demikian, warisan kearifan lokal ini dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat politik berbasis etika dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat modern

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. (1985). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Alamsyah, Yayan. (2004). *Struktur Sosial dan Politik Masyarakat Sunda*. Bandung: Humaniora.
- Ali, Abdullah Yusuf. (2000). *The Meaning of the Holy Quran*. Maryland: Amana Publications.
- Ekadjati, E. S. (1995). *Naskah Sunda: Inventarisasi dan Panduan*. Bandung: Kiblat.
- Geertz, Clifford. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono. (1982). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. (1993). *Sejarah Perlawanan-Perlawanan Indonesia terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, Mochtar. (2002). *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*. Jakarta: LP3ES.
- Nasution, Harun. (2012). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Nurchahya, Y., Sugiarto, D., Samsudin, S., & Sudana, D. S. (2024). *Kontribusi Mohammad Natsir dalam Perkembangan Islam di Indonesia Masa Orde Lama (1945 – 1965)*. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 359–365. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2422>
- Nurchahya, Yan. (2021). *Revitalization Skywalk Bandung 2021 Reviving The Urban Area "Urban Space" In Bandung*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JARE/article/view/35802>
- Nurchahya, Yan. (2023). *Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>

- Nurcahya, Yan. (2024). *Ide-ide Pokok Dalam Filsafat Sejarah–Misnal Munir: Ringkasan*. <https://data.mendeley.com/datasets/dk9828kmdv/1>
- Nurcahya, Yan. At al. (2024). *Community Revitalization Strategy In Aksara Incung*. Vol. 21 No. 2 (2024): Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam
- Nurcahya, yan., at al. (2024). *Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945*. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurcahya, Yan., at al. (2024). *Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan*. Bandung: Referensi Cendikia.
- Oksa Putra, M. Z., Nurcahya, Y., Kautsar Thariq Syah, M., Sugiarto, D., & Hafiy Bin Abdul Rashid, M. (2025). *Social Dynamics in the Preservation of the Incung Script: A Sociological Study of the Role of the Jambi Community in Maintaining the Cultural Heritage of the Kerinci Tribe*. TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial, 8(1), 105–117. <https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.33795>
- Poesponegoro, Marwati Djoened, & Notosusanto, Nugroho. (1992). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Mudjia. (2005). *Demokrasi, Agama, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Subagya, R. (1981). *Agama-Agama di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Supendi, U., Thariq Syah, M. K., & Nurcahya, Y. (2025). *Peran Cheng Ho Dalam Merintis Islamisasi Sunda*. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 190–203. <https://doi.org/10.59757/sharia.v2i1.55>
- Suryanegara, Ahmad Mansur. (1998). *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.